

2024



RENCANA KERJA

PUSAT PENYULUHAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

© 2023 Pusat Penyuluhan



ASEAN
INDONESIA
2023



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

PEMBERIAN
TELADAN W
TINGKAT
TAHU

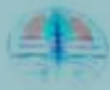
JAKARTA, 15



PENGHARGAAN
YANA LESTARI
NASIONAL
IN 2023
5 AGUSTUS 2023



ASEAN
INDONESIA
2023



ASEAN
INDONESIA
2023



TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU



RENJA
2024



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENYULUHAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN

NOMOR : SK.28/LUH/TU/REN.4.6/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PENYULUHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2024, diperlukan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dengan Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
23. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024;
24. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor SK.32/P2SDM/SET.11/KEU.0/12/2023 tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada kegiatan Peningkatan Penyuluhan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2023

Kepala Pusat Penyuluhan



Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si
NIP. 196910161994031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2024 merupakan penjabaran kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sesuai dengan arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Rencana Kerja ini bertujuan untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pendekatan penganggaran berbasis program dan pendekatan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) masih menjadi pendekatan utama dalam penyusunan rencana kerja ini.

Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu meningkatkan daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : Sebanyak 1.000 orang Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal), KTH Mandiri yang terbentuk sebanyak 100 kelompok masyarakat, serta Lembaga Pelatihan Pengembangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan sebanyak 50 kelompok masyarakat. Ketiga IKK tersebut diuraikan dalam kertas kerja RKA-KL Satker Pusat Penyuluhan Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dan Satker Pusat Penyuluhan dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran pelaksanaan kegiatan.



Jakarta, 27 Desember 2023

Kepala Pusat,

Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001



PEMBERIAN PENGHARGAAN TELADAN WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

JAKARTA, 15 AGUSTUS 2023



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tugas Pukok, dan Fungsi.....	4
1.3. Struktur Organisasi	5
1.4. Sumber Daya Manusia pada Pusat Penyuluhan.....	5
1.5. Pengarusutamaan	6
II. CAPAIAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023.....	9
2.1. Capaian Tahun 2022.....	10
2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	10
2.1.2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022.....	13
2.2. Prognosis Capaian Tahun 2023.....	14
2.2.1. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.....	14
2.2.2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023.....	15
III. RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	17
3.1. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Prioritas Nasional.....	18
3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024.....	22
IV. PENUTUP.....	29
4.1. Penutup.....	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan.....	5
Tabel 1.2. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan tingkat pendidikan.....	6
Tabel 1.3. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 2.1. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2022.....	10
Tabel 2.2. Rincian Pencapaian Kinerja Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) Tahun 2022.....	12
Tabel 2.3. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2022.....	13
Tabel 2.4. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2023.....	14
Tabel 2.5. Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2023.....	15
Tabel 3.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam Mendukung Prioritas Nasional 3.....	19
Tabel 3.2. Penyesuaian Indikator Kinerja Badan P2SDM Tahun 2020 - 2024.....	23
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rincian Output (RO) Pusat Penyuluhan.....	25
Tabel 3.4. Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output dan Target Rincian Output Pusat Penyuluhan Tahun 2024.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.....	5
Gambar 1.2. Grafik SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan jenis kelamin.....	6
Gambar 3.1. Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	18
Gambar 3.2. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	22
Gambar 3.3. Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 3.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Penyuluhan Tahun 2024.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2023.....	31
---	----

BAB. I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Pemerintah melakukan kebijakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP Tahun 2024 dengan RPJMN Tahun 2020-2024, tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional. Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 terdiri dari : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.





Dengan mengusung tema **geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata** untuk Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2024, Kementerian ingin menguntai pesan bahwa hasil kerja di tingkat tapak mulai bisa diartikulasikan dalam pembangunan wilayah. Kementerian LHK terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup yang tidak terlepas dari kontribusi SDM pengelola sumber daya. Mereka harus dapat bersaing secara global dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi global. Kebijakan Pemerintah tidak hanya pada peningkatan kualitas sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada sumber daya manusianya. Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional, Kementerian LHK mendukung 4 Prioritas Nasional diantaranya PN-1, PN-2, PN-3 dan PN-6. Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu pada PN-1, PN-3 dan PN-6 melalui 11 (sebelas) kegiatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi BP2SDM, fokus utama kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM adalah penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia LHK, Pusat Penyuluhan sebagai Unit Kerja Eselon II yang melaksanakan tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan berfokus pada PN-3.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan tersebut, Pusat Penyuluhan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sekaligus mewujudkan pencapaian target prioritas nasional sebagaimana yang telah dijelaskan. Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 selain berisi penjabaran kegiatan penyuluhan sesuai arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta memuat tindak lanjut terhadap pelaksanaan kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Dokumen Renja ini terdiri dari Keputusan Kepala Pusat, Pengantar, Pendahuluan, Capaian Sasaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2024, Penutup dan Lampiran.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat penyuluhan merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai Eselon II di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Pusat penyuluhan menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi Pusat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Penyuluhan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat. Sementara Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021, struktur organisasi Pusat Penyuluhan terdiri atas Kepala Pusat, 1 Eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi secara lebih jelas dijelaskan sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.

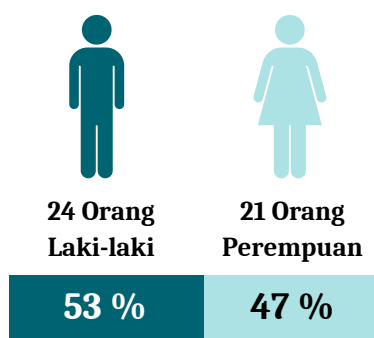
1.4. Sumber Daya Manusia pada Pusat Penyuluhan

Sumber daya manusia pada Pusat Penyuluhan terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang pada tahun 2023 memiliki total pegawai 45 orang yang terdiri dari 42 ASN dan 3 orang PPNPN sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan.

No.	Jenjang Pendidikan	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		Jumlah		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Doktor	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	4
2	Pasca Sarjana	5	1	2	2	-	-	-	-	7	3	10
3	Sarjana	2	4	8	7	1	5	-	-	11	16	27
4	D-III	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2
5	D-II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	D-I	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
7	SMA	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
8	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah (L+P)		9	7	11	9	4	5	-	-	24	21	45
Jumlah Per Golongan		16		20		9		-		45		45

Keterangan : Tenaga Kontrak 3 orang



Gambar 1.2. Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan jenis kelamin.

Sumber daya manusia pada Pusat Penyuluhan terdiri dari 53% laki-laki dan 47% perempuan seperti yang tersaji pada Gambar 1.2. Bila dilihat berdasarkan sebaran tingkat pendidikan, Pusat Penyuluhan memiliki 4 SDM dengan tingkat pendidikan doktor, 10 orang tingkat Pascasarjana, 27 orang tingkat Sarjana, 2 orang tingkat Diploma III dan 2 orang tingkat SMA yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2. Dari segi komposisi Golongan (Tabel 1.3.), Pusat Penyuluhan terdiri dari 16 orang Golongan IV, 20 orang Golongan III, 1 orang Golongan II, 5 orang PPPK dan 3 orang PPNPN.

Tabel 1.2. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan tingkat pendidikan.

Pendidikan	Jumlah
Doktor	4
Pasca Sarjana	10
Sarjana	27
D-III	2
D-II	-
D-I	-
SMA	2

Tabel 1.3. Sebaran SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Golongan.

Golongan	Jumlah
IV	16
III	20
II	1
PPPK	5
PPNPN	3

1.5. Pengarustamaan

Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian LHK, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarustamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilainilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Dalam hal pengarusutamaan digital, Pusat Penyuluhan selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi seperti Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH), Forestamart serta *Learning Management System (LMS) E-Learning*.





BAB. II

CAPAIAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023



2.1. Capaian Tahun 2022

Capaian Kinerja Tahun 2022 memuat capaian indikator kinerja kegiatan dan capaian serapan anggaran di tahun 2022. Pengukuran capaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi capaian pada tahun berjalan.

2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Tahun 2022 menjadi tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2020 - 2024. Pusat Penyuluhan mendukung program Badan P2SDM pada Prioritas Nasional 3 (PN-3) yang dilakukan melalui program prioritas “Pengentasan Kemiskinan” melalui kegiatan “Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial” yang memiliki sasaran meningkatnya daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Kegiatan dan sasaran Pusat Penyuluhan ini telah disesuaikan dengan penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan pada Pusat Penyuluhan di Tahun 2022 memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah KTH (KTH Mandiri);
2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan; dan
3. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal).

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 dijelaskan sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2022.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2022	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	90	90	100%
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan	Unit	50	50	100%
2	Meningkatnya kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.700	1.700	100%
Rata-Rata Capaian						100%

Berdasarkan perhitungan Tabel 2.1., nilai rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Nilai rata-rata capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2022 telah tercapai.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1 yakni Jumlah KTH (KTH Mandiri) tahun 2022 yaitu 90 unit. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KTH (KTH Mandiri) merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Adapun pengertian KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama. KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan dan mengelola usaha. Target indikator kinerja 1 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu 90 unit KTH Mandiri. Target tersebut telah tercapai 100% dimana 90 KTH telah difasilitasi menjadi KTH Mandiri hingga akhir tahun 2022. 90 KTH yang difasilitasi tersebut tersebar di 18 provinsi dengan berbagai komoditas yang diusahakan yaitu: madu, jamur tiram, kopi, cuka kayu, pengolahan kemiri, kapulaga, empon-empon, aren, pinang, cengkeh, kerajinan bambu, rotan, pupuk organik, pembibitan mangrove, agrosilvofishery, agrosilvopastura, jasa lingkungan dan produk HHBK lainnya.



Target **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2** yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu 50 unit Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan. Target Pembentukan KTH menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya sebanyak 20 KTH telah tercapai 100%, dimana terdapat 20 KTH telah difasilitasi pembentukan LP2UKS hingga akhir tahun 2022. Fasilitasi ini diberikan kepada 20 KTH yang tersebar di 15 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara dengan usaha dan komoditas antara lain agroforestri, gaharu, HR sengon, wisata alam, budidaya lebah madu, gula aren, kopi, sereh wangi, jamur tiram, minyak nilam, pembibitan alpukat siger, pengolahan produk turunan mete, empon-empon, kerajinan kayu, kerajinan mebel bambu, anyaman, konservasi mangrove dan sebagainya.

Sedangkan pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan terhadap 30 KTH yang telah ditetapkan menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya meliputi pengembangan usaha berbasis komoditas kelompok, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan/pemagangan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola. Target tersebut tercapai 100% dengan dilaksanakannya pengembangan terhadap 30 Wanawiyata Widyakarya yang tersebar di 14 provinsi yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali , NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.



Target **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3** Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) tahun 2022 yaitu 1.700 orang. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun yaitu 1.700 orang atau sebesar 100%. Adapun rincian pencapaian kinerja IKK 1 secara lebih jelas sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Rincian Pencapaian Kinerja Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) Tahun 2022.

No	Kegiatan Temu Teknis	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
I Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Aparatur			
1	Temu Teknis PK Komoditi Jamur Angkatan I	100 orang	16 s.d. 20 Mei 2022
2	Temu Teknis PK Komoditi Jamur Angkatan II	100 orang	20 s.d. 24 Juni 2022
3	Temu Teknis PK Komoditi Bambu Angkatan I	100 orang	25 s.d. 29 Juli 2022
4	Temu Teknis PK Komoditi Bambu Angkatan II	100 orang	8 s.d. 12 Agustus 2022
5	Temu Teknis PK Wisata Alam	50 orang	19 s.d. 21 Oktober 2022
6	Temu Teknis dalam menghadapi karhutla, banjir dan longsor	300 orang	15 Juni 2022
II Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Non Aparatur			
1	Temu Teknis PKSM Komoditas Mangrove	100 orang	12 s.d. 14 Juli 2022
2	Temu Teknis PKSM Wisata Alam	30 orang	13 s.d. 15 September 2022
III Webinar Series Komoditas Prospektif Bidang Kehutanan			
1	Webinar Series Komoditas Jamur	286 orang	17 Maret 2022
2	Webinar Series Komoditas Bambu	271 orang	24 Maret 2022
3	Webinar Series Komoditas Wisata Alam	263 orang	31 Maret 2022

2.1.2. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Dalam mencapai target kinerja, Pusat Penyuluhan memanfaatkan anggaran yang dibebankan kepada DIPA Satker Kantor Pusat Badan P2SDM sebagaimana tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2022 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA- 029.08.1465019/2022 tanggal 17 November 2021. Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.621.842.000,-. Pada tahun berjalan terdapat pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada semua K/L termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Pagu yang telah terblokir tersebut, kemudian direalokasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2022. Sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2022, Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 19.571.842.000,-.

Adapun capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sejumlah Rp. 19.545.422.007,- atau 99,87%. Capaian serapan anggaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2022.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Rincian Output (RO)	Target 1 Tahun	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
1	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	2.009.800.000	2.009.236.288	99,97
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan	1.550.644.000	1.547.089.771	99,77
		Meningkatnya kapasitas Penyuluhan	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	3.576.000.000	3.566.519.130	99,73
Program Dukungan Manajemen						
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Layanan dukungan manajemen satker	12.435.398.000	12.422.576.818	99,90
JUMLAH				19.571.842.000	19.545.422.007	99,87

2.2. Prognosis Capaian Tahun 2023

Prognosis Capaian Tahun 2023 memuat capaian indikator kinerja kegiatan dan capaian serapan anggaran di tahun 2023.

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Sampai pada tahun 2023, agenda pembangunan (AP)/ prioritas nasional (PN) masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 7 prioritas nasional. Sebagai bagian dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Sebagaimana yang dijelaskan, Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal);
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun hasil pengukuran prognosis capaian kinerja pada tahun 2023 dijelaskan sebagaimana pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.000	1.000	100
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	30	30	100
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	20	20	100

2.2.2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 16.678.125.000,- yang tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA- 029.08.1.465019/2023 tanggal 30 November 2022. Pada tahun berjalan terdapat pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada semua K/L termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Pagu yang telah terblokir tersebut, kemudian direalokasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2023 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2023. Sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 16.644.060.000,-.

Prognosis serapan anggaran Pusat Penyuluhan tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 16.641.306.637,- atau sebesar 99,98%. Prognosis capaian serapan anggaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No.	Uraian Kegiatan	Target 1 Tahun		Realisasi	
		Pagu Anggaran (Rp)	%	Keuangan (Rp)	%
1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.499.607.000	15,02	2.498.967.400	99,97
2	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.473.500.000	8,85	1.472.960.085	99,96
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12.670.953.000	76,13	12.669.379.512	99,99
Jumlah		16.644.060.000	100	16.641.306.637	99,98





PUSAT PENYULUHAN

BADAN PENYULUHAN

PENGEMBANGAN SDM K
18-10-2023

BAB. III

RENCANA KERJA TAHUN 2024



3.1. Strategis dalam mendukung Program Kementerian LHK dan Program Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029, serta menjaga stabilitas dalam menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024. Semangat yang diusung dalam RKP Tahun 2024 itu diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yang bertema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan "Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata" dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran makro ekonomi dalam pembangunan LHK tahun 2024, diantaranya adalah (1) Pertumbuhan 3-4% PDB dan ekspor sektor LHK yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; (2) Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 5-7% yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan; (3) Penurunan beban lingkungan sebesar 2-3% dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional, pada tahun 2024 Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN) masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020 - 2024 dengan 7 Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.1. Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 dari 7 Prioritas Nasional, yaitu :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1);
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2);
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3); dan
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6).



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas, 2023

Gambar 3.1. Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.

Dari 4 (empat) PN yang menjadi agenda Kementerian LHK, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) PN yaitu : PN-1, PN-3 dan PN-6. Adapun kegiatan pada Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Secara lebih rinci kegiatan Pusat Penyuluhan yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

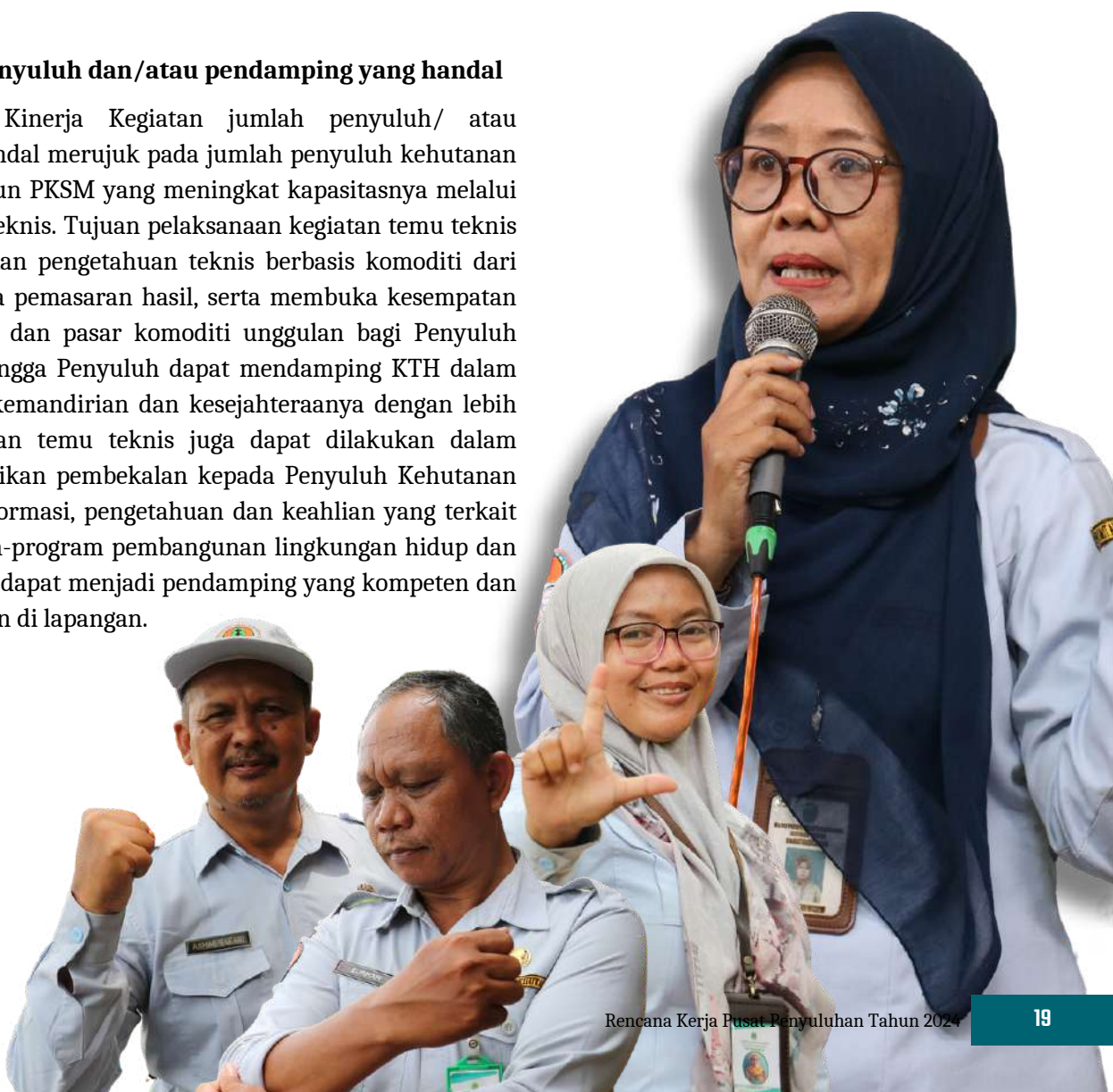
Tabel 3.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam Mendukung Prioritas Nasional 3.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek K/L (Rincian Output)
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kapasitas Penyuluhan dan/atau pendamping yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 3.1. bahwa Pusat Penyuluhan dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN, memiliki 3 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu :

1. Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal

Indikator Kinerja Kegiatan jumlah penyuluh/ atau pendamping handal merujuk pada jumlah penyuluh kehutanan baik PNS maupun PKSM yang meningkat kapasitasnya melalui kegiatan temu teknis. Tujuan pelaksanaan kegiatan temu teknis yaitu memberikan pengetahuan teknis berbasis komoditi dari budidaya hingga pemasaran hasil, serta membuka kesempatan akses informasi dan pasar komoditi unggulan bagi Penyuluh Kehutanan sehingga Penyuluh dapat mendampingi KTH dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya dengan lebih optimal. Kegiatan temu teknis juga dapat dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan kepada Penyuluh Kehutanan dalam akses informasi, pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan agar dapat menjadi pendamping yang kompeten dan dapat diandalkan di lapangan.



2. KTH Mandiri yang terbentuk

Indikator kinerja kegiatan jumlah KTH Mandiri merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Adapun pengertian KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama.

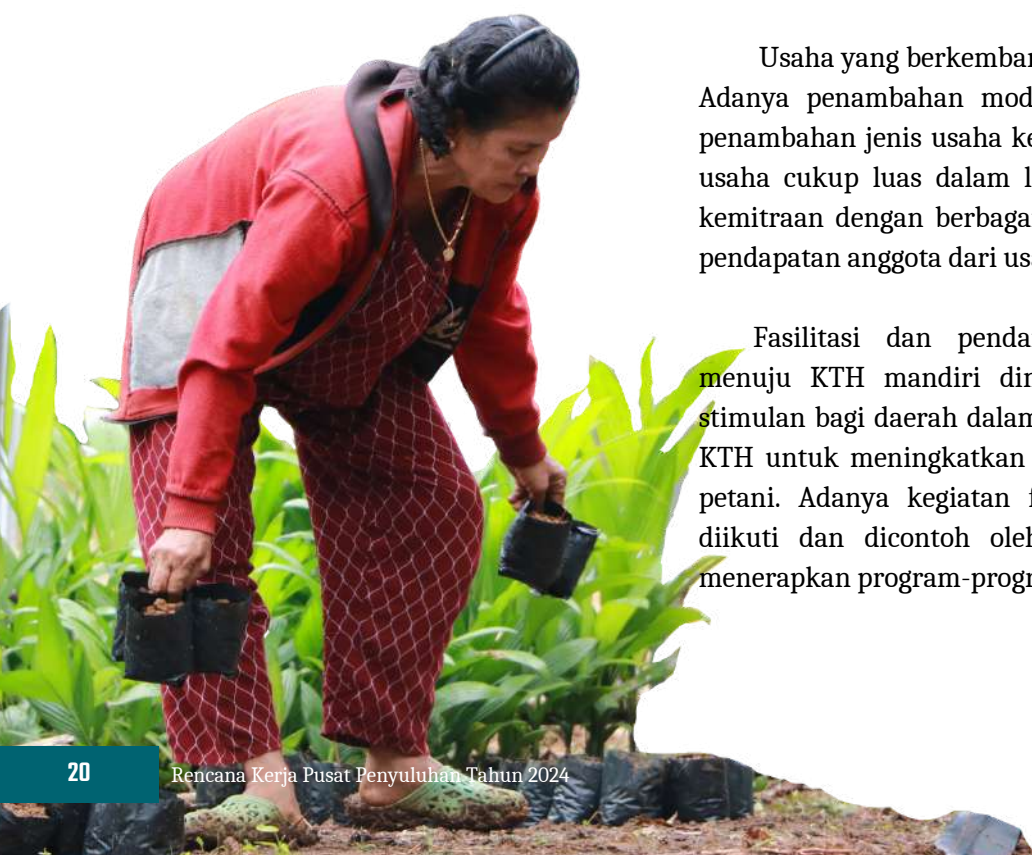
Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari kelas Pemula, kelas Madya dan kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH. Pengembangan KTH Menuju KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan dan mengelola usaha dengan tujuan akhir KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang lestari dan berkelanjutan, dengan usaha yang berkembang.

Kelembagaan KTH yang kuat dapat dicirikan antara lain : 1) adanya legalitas kelompok yang kuat (Akte Notaris); 2) adanya aturan kelompok yang dipahami dan ditaati bersama; 3) Manajemen kelompok (perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi) sudah dilaksanakan dengan baik dan teratur; 4) Administrasi kelompok rapi dan terdokumen; 5) Partisipasi anggota dalam kegiatan cukup baik (lebih dari 75% anggota aktif); 6) Susunan pengurus lengkap, pengurus menjalankan tugasnya sesuai pembagian tugas yang sudah ditetapkan bersama; 7) Adanya peningkatan kapasitas SDM Pengurus dan anggota; 8) Kelompok aktif/banyak mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pihak lain; 9) Regenerasi dan kaderisasi pemimpin dipersiapkan dengan baik; 10) Perhatian terhadap isu kearifan lokal terkait pengelolaan hutan/pelestarian sumberdaya alam dan kesetaraan gender cukup besar.

Kawasan lestari dan berkelanjutan dapat dicirikan antara lain : 1) Batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan dipahami dengan benar oleh pengurus dan anggota, ditata dan dipetakan (secara partisipatif); 2) Potensi, daya dukung dan permasalahan wilayah kelola teridentifikasi dan terpetakan dengan baik; 3) pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi dan diketahui para pihak; 4) Kelompok menjalankan kegiatan bidang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan/alam; 5) Adanya kelompok berdampak pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan sekitar; 6) Memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBM, SVLK); PIRT; Sertifikat Halal, SNI dan lain-lain.

Usaha yang berkembang dapat dicirikan antara lain : 1) Adanya penambahan modal usaha kelompok 2) Adanya penambahan jenis usaha kelompok; 3) Cakupan pemasaran usaha cukup luas dalam lingkup provinsi; 4) Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai pihak; 5) Adanya peningkatan pendapatan anggota dari usaha kelompok.

Fasilitasi dan pendampingan pengembangan KTH menuju KTH mandiri dimaksudkan untuk memberikan stimulan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas KTH untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Adanya kegiatan fasilitasi ini, diharapkan dapat diikuti dan dicontoh oleh Pemerintah Provinsi dengan menerapkan program-program serupa.



3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang

Wanawiyata Widyakarya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Perorangan atau Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri LHK sebagai lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya) merujuk pada banyaknya Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS yang dibentuk dari fasilitasi Pusat Penyuluhan melalui pendampingan Penyuluh Kehutanan.

Tujuan pembentukan wanawiyata widyakarya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat (pokmas) dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan pemagangan serta merangsang pertumbuhan wirausaha baru di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mendayagunakan peran dan fungsi Wanawiyata Widyakarya yang telah difasilitasi dan ditetapkan untuk dapat terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, maka Wanawiyata Widyakarya perlu difasilitasi pengembangannya. Selain itu, pendampingan oleh Penyuluh Kehutanan harus dilakukan terus menerus. Pengembangan Wanawiyata Widyakarya dilakukan agar Wanawiyata Widyakarya dimaksud memiliki manajemen yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang berstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS sebagai lembaga pelatihan terakreditasi diukur melalui banyaknya Wanawiyata Widyakarya yang difasilitasi dan didampingi untuk pengembangannya.



3.2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis BP2SDM 2020-2024 (Revisi), Badan P2SDM mendukung ke dalam 3 (tiga) dari 5 (lima) program Kementerian LHK yaitu:

1. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM LHK serta menyiapkan SDM LHK termasuk tenaga menengah kehutanan yang dapat langsung bekerja di bidang LHK, kelompok tani hutan dan dunia usaha guna membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan. BP2SDM dalam mendukung program ini diarahkan dalam meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;
3. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja KLHK. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.



Gambar 3.2. Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada tahun 2022 terdapat penyesuaian kembali pada indikator kinerja BP2SDM. Indikator Kinerja BP2SDM sesuai dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dan akan mulai digunakan pada tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 3.2. Perubahan Indikator Kinerja pada dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020- 2024 yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”. Perubahan indikator kinerja ini disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi ukuran kinerja BP2SDM dengan Pusat Penyuluhan sebagai penanggungjawab indikator dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 0,5 Triliun Rupiah.

Tabel 3.2. Penyesuaian Indikator Kinerja Badan P2SDM Tahun 2020 - 2024.

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program)/ Indikator Kinerja Program KLHK	Sasaran Badan P2SDM	Indikator Kinerja Badan P2SDM
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (2,5 Triliun Rupiah)
Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya (91.104 orang)
		Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (2.364 orang)
		Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (70 poin)
		Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (4.128 unit)
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian LHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenrintah (80 poin)

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM, disusun Peta *Cascading* Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah disusun Badan P2SDM sebagaimana Gambar 3.3.



Gambar 3.3. *Cascading* Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024.

Sebagaimana kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran, indikator kinerja Badan P2SDM kemudian dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta didetailkan pada klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) yang sudah ditetapkan. IKK dan RO Badan P2SDM telah disusun secara relevan untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan dan sasaran. Namun dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Badan P2SDM, khususnya Indikator Kinerja baru “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”, detail kegiatan untuk mencapai indikator tersebut hanya dicantumkan pada sub komponen di dalam Rincian Output KTH Mandiri. Hal ini dikarenakan penetapan Indikator Kinerja tersebut menjadi RO/Indikator Kinerja Kegiatan di Pusat Penyuluhan belum mendapat persetujuan dalam *Trilateral Meeting* antara Kementerian LHK, Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga belum dapat disetujui untuk menjadi Indikator Kinerja baru ataupun Rincian Output.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Penyuluhan mendukung 2 program kegiatan, yaitu (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan (2) Program Dukungan Manajemen. Secara lebih terperinci IKK, KRO dan RO Pusat Penyuluhan sebagaimana Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rincian Output (RO) Pusat Penyuluhan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
5444-Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat IKK : - Jumlah KTH (KTH Mandiri) (100 Unit) - Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (50 Unit) Meningkatnya kapasitas Penyuluh IKK : - Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal) (1.000 Orang)	KTH Mandiri (100 Kelompok Masyarakat)
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) (50 Kelompok Masyarakat)
		Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.000 Orang)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
5439-Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Badan P2SDM	Layanan Umum (1 Layanan)
		Layanan Sarana Internal (1 Paket)
		Layanan Perkantoran (1 Layanan)

Sebagaimana Gambar 3.3. dan Tabel 3.3 di atas, Pusat Penyuluhan mendukung tercapainya Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan, Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian LHK yaitu Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) dengan Indikator Kinerja BP2SDM Nilai Transaksi Ekonomi. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BP2SDM yang didukung oleh Pusat Penyuluhan, yaitu :



Gambar 3.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Penyuluhan Tahun 2024

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya memuat RO Layanan Manajemen Satker Pusat Penyuluhan yang memiliki sasaran kegiatan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, terdapat anggaran kegiatan Biaya Operasional (BOP) Penyuluh Kehutanan yang diepruntukan untuk Penyuluh Kehutanan Satker/UPT Kementerian LHK dan Penyuluh Kehutanan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi.

Penjabaran RO ke dalam elemen kegiatan tahun 2024 untuk Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen Satker di Pusat Penyuluhan tahun 2024 dijelaskan secara lebih rinci sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output dan Target Rincian Output
Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No.	Kegiatan	KRO	RO	Target RO TA. 2024	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN						
1	Peningkatan Penyuluhan	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.000 Orang	Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan
						Pemutakhiran Data Penyuluh Kehutanan dan Evaluasi Temu Teknis
						Sosialisasi Penyuluh Kehutanan/Pendamping Kelompok
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Aparatur
						Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
						Peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan dan SDM pendukung Pusat Penyuluhan
						Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2024
						Temu Karya Teladan LHK Wana Lestari
					Metode dan Materi Penyuluhan	Metode Penyuluhan dan Media Penyebaran Informasi
						Penerbitan Majalah Kenari
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri	100 Kelompok Masyarakat	Pembentukan KTH Mandiri	Pembentukan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri

No.	Kegiatan	KRO	RO	Target RO TA. 2024	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
					Pembinaan KTH Mandiri	Identifikasi Calon Penerima Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri
						Penyusunan, pembahasan dan penggandaan Panduan Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri serta Revisi Peraturan terkait
						Seleksi dan Verifikasi Pembentukan KTH Mandiri
						Sosialisasi Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri
						Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri
						Penyusunan laporan hasil Pembinaan 50 KTH Mandiri
					Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi KTH
						Pengumpulan data dan Pengembangan Aplikasi Nila Transaksi Ekonomi KTH
						Bimbingan Teknis Nilai Transaksi Ekonomi KTH
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	50 Kelompok Masyarakat	Pembentukan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya
						Identifikasi penetapan calon Wanawiyata Widyakarya
						Penyusunan, pembahasan dan penggandaan Panduan Pembentukan wanawiyata widyakarya serta Revisi Peraturan terkait
						Seleksi dan Verifikasi calon wanawiyata widyakarya

No.	Kegiatan	KRO	RO	Target RO TA. 2024	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
					Pengembangan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitasi pengembangan wanawiyata widyakarya
						Sosialisasi Wanawiyata Widyakarya
						Bimbingan Teknis Wanawiyata Widyakarya
						Monitoring dan Evaluasi wanawiyata widyakarta
						Penyusunan laporan hasil Pembinaan wanawiyata widyakarya
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan
						Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan
						Penyusunan Programa Penyuluhan
						Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2023
						Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan
						Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi
						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan
						Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kebijakan
						Pengelolaan Kearsipan
						Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan
		Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan				
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Paket	Pengadaan Sarana Fasilitasi Perkantoran	Pengadaan Sarana Informasi Pusat Penyuluhan		

BAB. IV

PENUTUP



KTH WONOSANTRI ABADI

PEMBERIAN TINGKAT NASIONAL
LUMBU WONIA LESTARI TAHUN 2023
KATEGORI
KELOMPOK TANI HUTAN

WONOSANTRI



DISHUT JATIM

PEKAYONAN

4.1. Penutup

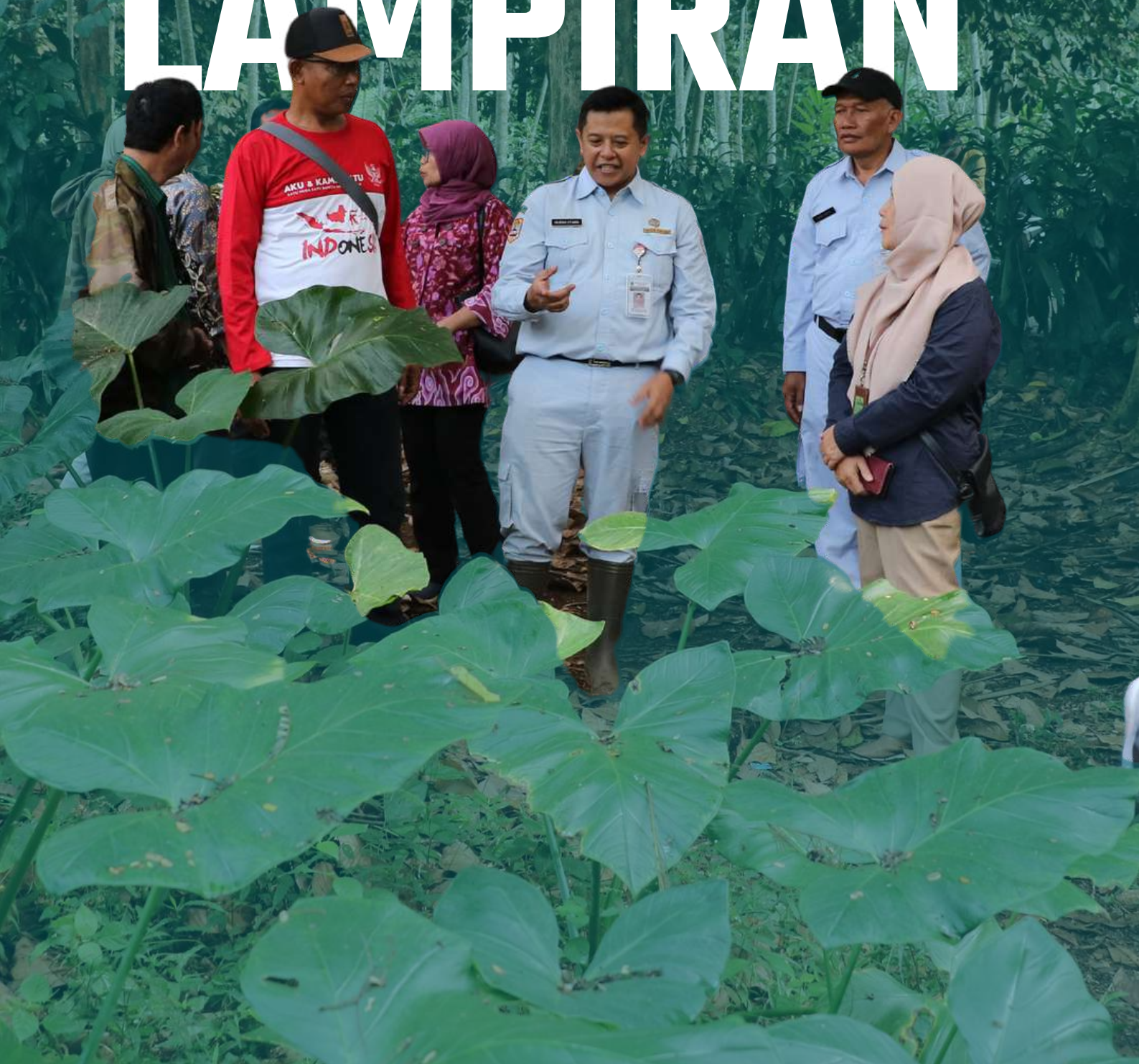
Penyusunan rencana program dan kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2024 yang mendukung Rencana Kerja Badan P2SDM dan Rencana Kerja Kementerian LHK ini difokuskan pada pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN 2020-2024. Hal ini merupakan upaya Pusat Penyuluhan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM LHK guna mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pusat Penyuluhan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai upaya mendukung tercapainya pembangunan nasional serta Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional demi mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Penyuluhan. Pada tahun 2024 kegiatan Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Matriks Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN										
1	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kapasitas Penyuluhan	Jumlah Penyuluhan LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluhan Handal)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kapasitas Penyuluhan dan/atau pendamping yang handal	Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kebutuhan	1 Laporan	Pusat dan Daerah	56.800.000
							Pemutakhiran Data Penyuluhan Kebutuhan dan Evaluasi Temu Teknis	1 Laporan	Pusat dan Daerah	36.800.000
							Sosialisasi Penyuluhan Kebutuhan/Pendamping Kelompok	200 Orang	Pusat dan Daerah	160.000.000
							Temu Teknis Penyuluhan Kebutuhan Aparatur	770 Orang	Pusat dan Daerah	282.100.000
							Temu Teknis Penyuluhan Kebutuhan Swadaya Masyarakat	30 Orang	Pusat dan Daerah	210.300.000
							Peningkatan kapasitas Penyuluhan Kebutuhan dan SDM pendukung Pusat Penyuluhan	1 Laporan	Pusat dan Daerah	104.000.000
							Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2024	1 Laporan	Pusat dan Daerah	150.000.000
							Temu Karya Teladan LHK Wana Lestari	1 Laporan	Pusat	1.000.000.000
							Metode Penyuluhan dan Media Penyebaran Informasi	1 Laporan	Pusat dan Daerah	317.000.000
							Penerbitan Majalah Kenari	1 Laporan	Pusat	83.000.000
							Pembentukan kelompok tani desa-desa hutan menuju KTH Mandiri	50 Kelompok Masyarakat	Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara	1.000.000.000

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi (Rp)
						Pembinaan KTH Mandiri	Identifikasi Calon Penerima Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri	1 Laporan	Pusat dan Daerah	27.200.000
							Penyusunan, pembahasan dan penggandaan Panduan Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri serta Revisi Peraturan terkait	1 Laporan	Pusat dan Daerah	30.650.000
							Seleksi dan Verifikasi Pembentukan KTH Mandiri	1 Laporan	Pusat dan Daerah	30.000.000
							Sosialisasi Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri	1 Laporan	Pusat dan Daerah	160.000.000
							Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pembentukan KTH Mandiri	1 Laporan	Pusat dan Daerah	44.000.000
							Penyusunan laporan hasil Pembinaan 50 KTH Mandiri	1 Laporan	Pusat dan Daerah	8.150.000
						Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi KTH	1 Laporan	Pusat dan Daerah	70.000.000
							Pengumpulan data dan Pengembangan Aplikasi Nilai Transaksi Ekonomi KTH	1 Laporan	Pusat dan Daerah	150.000.000
							Bimbingan Teknis Nilai Transaksi Ekonomi KTH	1 Laporan	Pusat dan Daerah	80.000.000
						Pembentukan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya	30 Kelompok Masyarakat	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jami, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.	750.000.000
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)					

No.	Kegiatan	Saaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi (Rp)
							Identifikasi penetapan Calon Wanawiyata Widyakarya	1 Laporan	Pusat dan Daerah	89.500.000
							Penyusunan, pembahasan dan penggandaan Panduan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya serta Revisi Peraturan terkait	1 Laporan	Pusat dan Daerah	48.107.000
							Seleksi dan Verifikasi calon Wanawiyata Widyakarya	1 Laporan	Pusat dan Daerah	51.000.000
						Pengembangan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)	Fasilitasi pengembangan Wanawiyata Widyakarya	20 Kelompok Masyarakat	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara	400.000.000
							Sosialisasi Wanawiyata Widyakarya	1 Laporan	Pusat dan Daerah	80.000.000
							Bimbingan Teknis Wanawiyata Widyakarya	1 Laporan	Pusat dan Daerah	66.500.000
							Monitoring dan Evaluasi Wanawiyata Widyakarya	1 Laporan	Pusat dan Daerah	43.550.000
							Penyusunan laporan hasil Pembinaan Wanawiyata Widyakarya	1 Laporan	Pusat dan Daerah	9.950.000

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi (Rp)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Badan P2SDM	Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan Dokumen Renja Pusat Penyuluhan	1 Dokumen	Pusat	30.100.000
							Penyusunan Dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan	1 Dokumen	Pusat	37.100.000
							Penyusunan Programa Penyuluhan	1 Dokumen	Pusat	49.600.000
							Penyusunan LKj Satker PUSLUH Tahun 2023	1 Dokumen	Pusat	40.600.000
							Evaluasi BMN Pusat Penyuluhan	1 Laporan	Pusat	30.600.000
							Pelaksanaan Tata Usaha dan Administrasi	1 Laporan	Pusat	58.700.000
							Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan	1 Laporan	Pusat	114.600.000
							Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kebijakan	1 Laporan	Pusat	42.100.000
							Pengelolaan Kearsipan	1 Laporan	Pusat	50.000.000
						Penyusunan SPIP Pusat Penyuluhan	1 Laporan	Pusat	46.600.000	
			Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan	1 Laporan	Lokasi PK PNS penerima BOP di daerah provinsi	9.634.560.000				
			Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pusat Penyuluhan	1 Layanan	Pusat	1.606.039.000		
			Layanan Sarana Internal	Pengadaan Sarana Fasilitasi Perkantoran	Pengadaan Sarana Informasi Pusat Penyuluhan	1 Dokumen	Pusat	250.000.000		
TOTAL										17.529.206.000







BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



pusluh klhk



@pusluhklhk



@pusluhklhk



PUSLUH KLHK



pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id